

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki tujuan cita – cita untuk memajukan negara dan bangsanya. Tujuan utama sebuah negara adalah memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat dipercaya, dan itu semua butuh campur tangan dari masyarakat (Setiyono, 2016).

Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu “*kratos*” kekuasaan dan “*demos*” oleh rakyat, sehingga sering diartikan pemerintahan dari rakyat untuk rakyat (Sulardi, 2013). Dalam negara-negara yang menganut sistem demokratis umumnya dianggap lebih baik partisipasi masyarakatnya dibanding di negara-negara dengan sistem lain. Di negara demokratis seperti Indonesia pemikiran yang mendasari untuk menjalankan partisipasi politik adalah karena kedaulatan ada di tangan (Budiardjo Miriam, 1994).

Demokrasi adalah salah satu bentuk sistem politik suatu negara. Wilson Churchill mengatakan bahwa demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik, tetapi tidak ada sistem yang lebih baik dari itu (Rosana, 2016). Definisi demokrasi menunjukkan bahwa rakyat memiliki otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, pengambil keputusan dan pengambil keputusan, serta mengontrol kebijakan yang secara langsung dilaksanakan oleh rakyat atau kebijakan yang dilaksanakan oleh wakilnya melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, negara yang menganut sistem demokrasi didasarkan pada kemauan dan kemauan mayoritas rakyat, dan tidak mengecualikan minoritas (Rosana, 2016). Partisipasi sangat di perlukan di sebuah negara untuk memajukan negara itu sendiri, terutama negara – negara

besar di dunia termasuk Indonesia sendiri yang memiliki masyarakat yang heterogen. Partisipasi dari masyarakat dapat menjadi sebuah tolak ukur negara untuk mengetahui apa yang diinginkan rakyatnya.

Agar partisipasi itu dapat berkembang dengan sangat baik terdapat beberapa prinsip untuk mewujudkannya yaitu melaksanakan partisipasi yang efektif dan itu dibutuhkan beberapa pihak yang terlibat dari awal tahapan (penyusunan agenda) hingga akhir tahapan (evaluasi) dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Prinsip lainnya yang dibutuhkan adalah pembangunan partisipasi dengan baik yaitu pihak – pihak yang terlibat dalam proses partisipasi kebijakan publik ini mengikutinya secara aktif, berdiskusi dengan baik, menyampaikan aspirasinya dan bernegosiasi. Prinsip terakhir yang dibutuhkan dalam pembangunan partisipasi ini adalah perlu adanya pemaknaan bahwa proses partisipasi ini adalah sebuah proses pembelajaran dan sebagai tempat perkembangan dari semua pihak yang terlibat. Dalam proses partisipasi ini terdiri dari berbagai pihak – pihak yang memiliki latar belakang yang berbeda – beda dimana satu sama lain akan terjadi interaksi, yang sejalan dalam proses pembuatan kebijakan publik ini maka dalam perjalanan waktu dapat memberi pelajaran dengan satu sama lain (Muchlis, 2015).

Sastroatmodjo menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi Pancasila. Dimana dengan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa mewujudkan itu dengan cara melalui pemilihan umum (Sastroatmodjo, 1995). Menurut Prihatmoko menyatakan bahwa pemilu disebut ”bermakna” apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, dan keefektifan (Putra, 2017).

Partisipasi pemilu yang berkualitas, menandakan adanya pemilih yang cerdas dan kritis dan hal tersebut akan dapat terpenuhi jika pemilih melek politik atau mengerti politik. Melihat substansi kekuatan literasi politik ada pada partisipasi politik warganegara yang kritis dan memberdayakan terkait dengan konsep-konsep pokok politik yang berdampak pada kehidupan warga. Literasi politik bukanlah semata konsep normatif, melainkan bauran antara pengetahuan, skill dan sikap politik (Karim, 2014). Dengan mengikuti partisipasi berarti sudah adanya keberanian untuk menerima tanggungjawab atas pilihan dan suatu usaha dari partisipasi, atau untuk mengambil bagian dalam suatu usaha dalam partisipasi itu sendiri (Rohman, 2009).

Pemilihan umum juga merupakan sebuah wadah untuk masyarakat berpartisipasi dalam memilih wakil mereka, karena masyarakat sendirilah yang akan menjadikan orang tersebut sebagai pemimpin atau presiden mereka. Walaupun pemilu diwajibkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi tetap ada aturan yang harus di taati dalam pemilu. Seperti salah satu contoh aturannya adalah, jika mengikuti pemilu harus genap berusia 17 tahun dan sudah menikah, karena pada umur 17 tahun sudah dianggap memiliki tanggung jawab dalam hal politik terhadap negaranya, sehingga diberikan hak untuk memilih wakil rakyat atau presiden.

Pemilihan umum tidak memandang latar belakang dari seorang individu, walaupun apapun latar belakangnya kaya, miskin, ataupun orang tersebut memiliki jabatan atau tidak, ataupun orang tersebut tinggal dipertanian ataupun dipedesaan, ataupun memandang profesi, ras, suku, dan agama. Semua masyarakat yang berlatar belakang apapun dapat mengikuti pemilu dengan catatan sudah sesuai dengan persyaratan umur. Terdapat sepuluh kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, masyarakat dalam hal ini adalah unsur-unsur masyarakat diluar lembaga legislative, eksekutif, judikatif, dan lembaga-

lembaga negara lainnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah warga negara, kelompok atau forum, organisasi kemasyarakatan, partai politik, media massa baik cetak maupun elektronik atau online, LSM, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Contoh lima dari kesepuluh ini adalah yang pertama, bekerjasama dengan KPU melaksanakan sosialisasi Pemilu. Kedua, melaksanakan pendidikan pemilih tentang apa dan mengapa tentang pendaftaran pemilih, tentang visi, misi dan program. Ketiga, keterlibatan anggota partai politik dalam proses pemilihan pengurus partai politik pada berbagai tingkat kepengurusan. Keempat, partisipasi pemilih memberikan suara pada Pemilu. Kelima, peliputan segala kegiatan yang menyangkut proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh para wartawan dan aparat media lainnya disampaikan melalui pemberitaan atau penyiaran berbagai jenis media massa tentang tahapan Pemilu (Subakti, 2013).

Segala peraturan sudah diatur dalam Undang-Undang, mengenai pemilu diatur di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Adapun bunyi pasal tersebut yaitu: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Hal ini berarti sudah dengan jelas bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara langsung tanpa melalui perwakilan, bebas memilih tanpa tekanan dari siapapun dan dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Salah satu contoh yang bisa diambil dari kasus pemilihan umum adalah pemilihan presiden 2019 yang bertepatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sebanyak 5 Kabupaten. Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah penduduk sebanyak 448.114, Kabupaten Bantul memiliki jumlah penduduk sebanyak 939.718, Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah penduduk sebanyak 765.284, Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.063.938, dan Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 413.961, dengan seluruh total penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.631.015 (Sumber: *Kependudukan Yogyakarta*, 2019).

Dengan jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka berikut rincian jumlah DPT di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo sebanyak 334.153, Kabupaten Bantul sebanyak 696.839, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 597.432, Kabupaten Sleman sebanyak 767.501, dan Kota Yogyakarta sebanyak 299.880, dengan seluruh total DPT di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 2.695.805 (Sumber: *KPU DIY*, 2018).

Dari data tersebut dapat di fokuskan pada daerah Kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 desa dengan rincian DPT dari masing – masing desa. Pada Kecamatan Bantul (Desa Palbapang, Desa Ringinharjo, Desa Trirenggo, Desa Sabdodadi, dan Desa Bantul) memiliki jumlah DPT sebanyak 46.758. Pada Kecamatan Jetis (Desa Canden, Desa Sumberagung, Desa Patalan, dan Desa Trimulyo) memiliki jumlah DPT sebanyak 43.300. Pada Kecamatan Bambanglipuro (Desa Mulyodadi, Desa Sumbermulyo, dan Desa Sidomulyo) memiliki jumlah DPT sebanyak 31.977. Pada Kecamatan

Kasihani (Desa Bangunjiwo, Desa Tamantirto, Desa Ngestiharjo dan Desa Tirtonirmolo memiliki jumlah DPT sebanyak 73.239. Pada Kecamatan Sedayu (Desa Argodadi, Desa Argorejo, Desa Argomulyo, dan Desa Argosari memiliki jumlah DPT sebanyak 35.280. Pada Kecamatan Pajangan (Desa Guwosari, Desa Triwidadi, Desa Sendangsari, dan Desa Temuwuh) memiliki jumlah DPT sebanyak 26.850. Pada Kecamatan Sewon (Desa Bangunharjo, Desa Pendowoharjo, dan Desa Panggungharjo) memiliki jumlah DPT sebanyak 71.349. Pada Kecamatan Banguntapan (Desa Jagalan, Desa Banguntapan, Desa Potorono, Desa Tamanan, Desa Baturetno, Desa Jambidan, Desa Singosaren, dan Desa Wirokerten) memiliki jumlah DPT sebanyak 76.680. Pada Kecamatan Imogiri (Desa Girirejo, Desa Karangtalun, Desa Kebonagung, Desa Sriharjo, Desa Imogiri, Desa Karantengah, Desa Selopaimoro, dan Desa Wukirsari) memiliki jumlah DPT sebanyak 48.333. Pada Kecamatan Pleret (Desa Bawuran, Desa Pleret, Desa Wonokromo, Desa Segoroyoso, dan Desa Wonoleno) memiliki jumlah DPT sebanyak 34.139. Pada Kecamatan Piyungan (Desa Stitimulyo, Desa Srimulyo, dan Desa Srimartini) memiliki jumlah DPT sebanyak 37.914. Pada Kecamatan Dligo (Desa Mangunan, Desa Dlingo, Desa Temuwuh, Desa Jatimulyo, Desa Munthuk, dan Desa Terong) memiliki jumlah DPT sebanyak 30.717. Pada Kecamatan Pandak (Desa Caturharjo, Desa Triharjo, Desa Gilangharjo, dan Desa Wijirejo) memiliki jumlah DPT sebanyak 39.324. Pada Kecamatan Srandakan (Desa Poncosari dan Desa Trimurti) memiliki jumlah DPT sebanyak 24.273. Pada Kecamatan Sanden (Desa Gadingharjo, Desa Murtinggading, Desa Gadingsari, dan Desa Srigading) memiliki jumlah DPT sebanyak 25.137. Pada Kecamatan Kretek (Desa Dinotirto, Desa Tirtoharjo, Desa Tirtosari, Desa Parangtritis, dan Desa Tirtomulyo) memiliki jumlah DPT sebanyak 24.003. Pada Kecamatan Pundong (Desa Parangrejo, Desa Srihardono, dan Desa Seloharjo) memiliki jumlah DPT sebanyak 27.566.

Total DPT dari seluruh 17 Kecamatan dan 696.839 (Sumber: *KPUD Bantul*, 2019).

Beberapa desa di Kabupaten Bantul masih ada beberapa masyarakat yang belum terlalu peduli terhadap pemilihan presiden karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di pedesaan, karena kurangnya sosialisasi itu membuat masyarakat disana tidak mengerti bagaimana sistem pemilihan presiden dengan baik, hal tersebut yang menjadikan masyarakat menjadi tidak begitu peduli dengan pemilihan presiden. Karena dengan sosialisasi masyarakat mengerti dan paham bagaimana pentingnya satu suara mereka untuk pemilihan umum.

Sebenarnya secara umum masyarakat pedesaan sama dengan masyarakat kota. Masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan dan dikategorikan sebagai masyarakat yang hidup dengan suasana, cara pemikiran pedesaan, maka letak perbedaan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat kota adalah dari segi geografisnya, seperti tempat tinggalnya (Siswopangripto, 1984).

Seperti yang sudah tertera pada Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Menurut Pasal 22 Ayat (1) undang-undang itu dalam ibukota negara, ibukota provinsi, ibukota kabupaten, kotamadya, kota administratif dan kota-kota lain yang ditentukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dapat dibentuk kelurahan tersebut dalam Pasal 1 huruf b, ini desa-desa ada, baik diwilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan (Ndraha, 1982).

Memilih salah satu kandidat seperti presiden adalah sebuah bentuk tanggung jawab seseorang sebagai warga negara. Inilah pendapat terkuat yang ada dalam pikiran warga negara yang tidak mau mengambil hak pilihnya atau

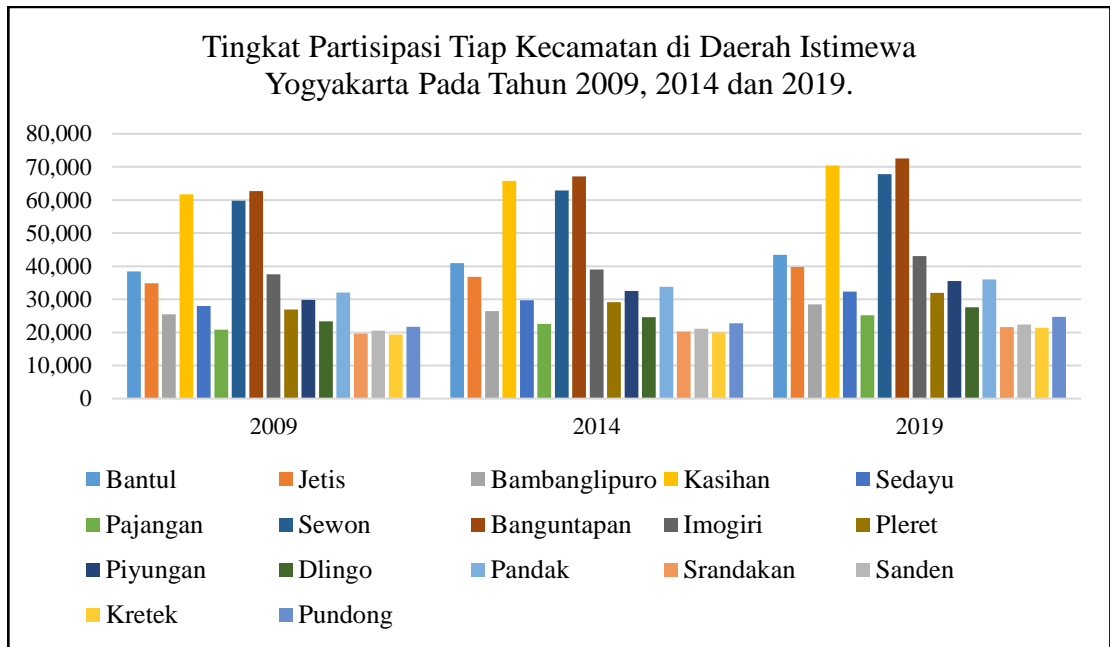
golput, pendapat ini terbentuk berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sampai sejauh ini fakta-fakta itu tidak pernah berubah. Golput bukan berarti orang tidak peduli pada masa depan bangsa. Justru sebaliknya, memilih golput biasanya adalah bentuk lain kepedulian pada masa depan bangsa. Golput harus dilihat sebagai bentuk protes warga negara terhadap parpol dan pemerintah. Dalam konteks penegakan demokrasi, golput bahkan harus dilihat sebagai bentuk protes yang paling santun terhadap calon kandidat dan pemerintah. Sebab, ada cara selain golput yang dapat digunakan untuk mengubah kondisi satu negara. Tapi cara lain itu bisa jadi mengancam demokrasi dan malah kehidupan berbangsa dan bernegara yang mundur (Wahid, 2009).

Bahkan selama ini bagian desa masih dicirikan dengan banyaknya kemiskinan atau rendahnya tingkat tenaga kerja. Padahal desalah yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan dari sebuah negara untuk mewujudkan cita-cita negara tersebut. Data Sensus Penduduk tahun 2000 sekitar 60% atau sekitar atau sebagian besar penduduk di Indonesia saat ini masih tinggal di kawasan permukiman perdesaan. Padahal cukup banyak sumbangan sektor pertaniandari desa, sementara itu tetap saja masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggal di perdesaan.

Berdasarkan data dibawah ini, dapat diketahui seberapa besar partisipasi masyarakat desa di Kabupaten Bantul dalam pemilihan presiden dari tahun ke tahun. Berikut tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Banguntapan dari tahun 2009 sampai 2019 dalam bentuk gambar diagram.

Gambar 1.1.1

Tingkat Partisipasi Tiap Kecamatan Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2009, 2014 dan 2019



Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa partisipasi masyarakat desa di tiap kecamatannya dari tahun ke tahun meningkat, tetapi jika di lihat lebih mendalam dan dibandingkan dengan DPT dari tiap tahunnya masih adanya beberapa masyarakat yang tidak mengikuti pemilu, maka dalam penulisan ini akan dibahas bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan presiden ini. Terutama pada Kecamatan Banguntapan yang terdiri dari 8 desa yaitu Desa Jagalan, Desa Banguntapan, Desa Potorono, Desa Tamanan, Desa Baturetno, Desa Jambidan, Desa Singosaren, dan Desa Wirokerten. Diantara seluruh kecamatan memang Kecamatan tersebutlah yang terjadi gap yang cukup besar antara DPT dan jumlah partisipasinya walaupun memang dari tahun 2004 ke tahun 2014 terjadi peningkatan tetapi pada tahun 2014 ke tahun 2019 mengalami penurunan. Gap yang terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar

16.850 dan tahun 2014 sebesar 13.266, maka jika ditotalkan gap pada kecamatan tersebutlah yang paling besar.

Kecamatan Banguntapan juga menjadi salah satu kecamatan yang ekonomi dan pendidikannya sudah termasuk bagus dan dengan pendidikan yang sudah cukup bagus seharusnya masyarakat desa yang tinggal di Kecamatan Banguntapan sudah mengerti betapa pentingnya mereka dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum terutama pemilihan presiden yang akan menjadi pemimpin tertinggi di Negara atau mungkin masyarakat desa yang tinggal di Kecamatan Banguntapan memiliki alasan lain selain hal – hal tersebut, karena hal ini cukup menarik untuk dibahas dan teliti.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari pembahasan kali ini. Rumusan masalah ini bisa menjadi inti pembahasan dari latar belakang penelitian ini. Penulis mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan di bahas kedalam pertanyaan-pertanyaan, yaitu:

1. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya keikutsertaan masyarakat desa di Kecamatan Banguntapan?
2. Mengapa masyarakat di Kecamatan Banguntapan masih menunjukkan kecenderungan rendahnya keikutsertaan dalam pemilu presiden?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan kali ini. Tujuan penelitian dari pembahasan kali ini agar dapat menjadi bahan evaluasi dari kegiatan yang sudah berlangsung. Maka dari itu, penulis mencoba merumuskan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi faktor – faktor rendahnya partisipasi masyarakat desa pada Pilpres 2019 di lingkungan Kecamatan Banguntapan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan presiden 2019 di Kecamatan Banguntapan.
3. Untuk mengetahui alasan masyarakat di Kecamatan Banguntapan masih menunjukkan kecenderungan meikutsertaan dalam pemilu presiden rendah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam pembahasan kali ini. Maka dari itu, penulis mencoba merumuskan beberapa kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis

Sebagai sarana pengetahuan dalam menambah kajian mengenai kasus partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan presiden 2019 di Kecamatan Banguntapan.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan untuk pemerintah dan masyarakat Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dalam mengetahui partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan presiden 2019 di Kecamatan Banguntapan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Persepsi Masyarakat

Kehidupan bermasyarakat itu tidak akan terlepas dari persepsi masyarakat itu sendiri. Pada kamus besar psikologi, persepsi merupakan sebuah proses pengamatan dari seseorang terhadap lingkungan dengan

menggunakan indra – indra yang dimiliki orang tersebut sehingga orang tersebut menjadi sadar akan segala hal sesuatu yang terjadi di lingkungannya (Asrori, 2009).

Persepsi ini berasal dari Bahasa Inggris yaitu, *perception* yang berarti persepsi, yaitu sebuah proses yang sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya melalui panca indra yang dimiliki atau pengetahuan lingkungan yang didapat dengan interpretasi data indera (Jalaluddin, 2001).

Pengertian dari persepsi ini adalah sebuah tanggapan langsung dari suatu serapan atau dari proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui pengindraannya (Asrori, 2009).

Sarlito W. Sarwono mengatakan bahwa persepsi masyarakat merupakan sebuah proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan juga pengaturan informasi indrawi atau sebuah proses pencarian informasi untuk dipahami dengan menggunakan alat indra. Dalam persepsi mengandung sebuah proses dalam diri agar mengetahui dan dapat mengevaluasi sudah sejauh mana yang kita mengetahui orang lain. Proses ini adalah proses kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai muncul dan cara pandang inilah yang dapat menentukan bagaimana kesan yang dihasilkan dari proses persepsi tadi (Listyana, 2015).

Menurut Slameto pengertian dari persepsi ini adalah sebuah proses yang memiliki keterkaitan dengan masuknya informasi atau pesan kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungannya dengan lingkungan dan hubungan ini dilakukan lewat indranya, yaitu, indra penglihat, indra pendengar, indra peraba, indra perasa, dan indra pencium (Slameto, 2010).

Menurut Robbins, persepsi adalah sebuah kesan yang didapat oleh individu melalui panca indera lalu kemudian dianalisa, diinterpretasi lalu dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna itu sendiri (Robbins, 1999).

Eysenck juga menyatakan bahwa pengertian persepsi itu adalah sebuah proses belajar atau pengalaman, dan hasil dari proses belajar dan interaksi seseorang ini akan memberikan pengalaman bagi dirinya untuk dapat membandingkan keadaan yang ia hadapi (Asrori, 2009).

Simanjuntak mengatakan bahwa persepsi ini didefinisikan sebagai sebuah proses dari individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka dengan tujuan memberi makna kepada lingkungan mereka (Sarbaini, 2015).

Jalaludin Rahmat mengatakan bahwa, persepsi adalah sebuah pengalaman mengenai objek peristiwa atau hubungan yang didapat dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Jalaluddin, 2001).

Selanjutnya, pendapat dari Gulo mengatakan bahwa persepsi adalah proses dari seseorang menjadi sadar tentang segala hal dalam lingkungannya melalui indera yang mereka miliki (Ayu, 2016).

Dengan menggunakan teori diatas kita akan dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terkait pelaksanaannya Pemilu tahun 2019 di Kecamatan Banguntapan, karena dengan teori tersebut dapat menjawab alasan terkait tingkat partisipasi mereka yang rendah.

Terkait dengan persepsi masyarakat Kecamatan Banguntapan dalam Pemilu 2019, dapat dikaitkan dengan teori Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa faktor tinggi rendahnya dalam partisipasi politik dapat dilihat

pada lima faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik, yaitu kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orangtua dan pengalaman organisasi (Faiz & Kushandajani, 2018).

1.5.2 Motivasi

Motivasi adalah sebuah proses yang dapat menjelaskan terkait kekuatan, arah dan ketekunan seseorang dalam upaya guna mencapai tujuannya (Andjarwati, 2015).

Motivasi ini juga berasal dari kata motif yang berarti sebagai kekuatan yang terdapat pada seorang individu dan menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat (Ridho, 2020).

Maslow berpendapat bahwa seseorang dapat termotivasi karena urutan kadar kepentingan dari urutan yang terendah sampai urutan tertingginya tidak terpenuhi (Andjarwati, 2015).

Pendapat dari Michel J. Jucius mengatakan bahwa motivasi adalah kegiatan yang memberikan dorongan kepada seseorang atau kepada diri sendiri terkait pengambilan suatu tindakan yang dikehendaki (Prihartanta, 2015).

Motivasi adalah kekuatan, daya, tenaga, atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan individu untuk bergerak kearah tujuan tertentu yang ia tuju, baik di sadari maupun tidak disadari (Bahar, 2018).

Motivasi merupakan gejala psikologis yang membentuk sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar guna melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Hal ini juga bisa dilakukan dalam bentuk usaha menyebabkan seseorang atau kelompok tersebut tergerak

melakukan sesuatu karena mereka ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau diinginkan agar mendapat kepuasan dengan perbuatannya (Prihartanta, 2015).

Motif adalah pergerakan pada seseorang untuk melakukan suatu aktifitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu. Pinder mengatakan motivasi adalah kumpulan tenaga yang berasal dari dalam maupun luar individu yang memulai sikap dan menetapkan arah, bentuk dan intesitasnya (Ridho, 2020).

Menurut Robert Slayn, motivasi adalah proses internal yang menuntun, mengaktifkan, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Secara sederhananya, motivasi adalah sesuatu yang membuat berjalan, dan membuat anda akan tetap terus berjalan sampai menentukan ke arah anda akan berusaha berjalan (Robert, 2009).

1.6 Operasional Konsep

Jenis	Definisi	Indikator
Persepsi Masyarakat	Persepsi adalah sebuah kesan yang didapat oleh individu melalui panca indera lalu kemudian dianalisa, diintepretasi lalu dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna itu sendiri.	<p>Keterlibatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjadi anggota Partai Politik. <p>Setiap masyarakat mendapatkan hak untuk menjadi anggota partai politik tetapi dengan syarat yang dimana sedang tidak dalam status Pegawai Negeri yang dimana harus netral dari semua golongan dan partai politik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.</p>

-
2. Memberikan opini terhadap kebijakan pemerintah.

Salah satu alasan mengapa masyarakat dapat melibatkan opininya kepada kebijakan pemerintah adalah karena opini publik juga dapat diperhitungkan dalam sebuah kebijakan, karena hal ini juga membutuhkan sebuah pandangan dari kelompok atau individual.

3. Hadir dalam setiap kampanye.

Keterlibatan masyarakat dalam menghadiri setiap kampanye adalah agar masyarakat itu sendiri mengetahui materi yang akan disampaikan oleh setiap kandidat, seperti visi misi dari kandidat tersebut.

Peran:

1. Masyarakat sebagai *voters*.

Hak ini adalah hak yang dimana masyarakat dapat memberikan suaranya atau mengikuti Pemilu.

Hak memilih adalah salah satu jenis hak asasi manusia.

2. Masyarakat sebagai *judges*.

Dalam hal ini masyarakat juga dapat didorong untuk menjadi pengawas dalam Pemilu yang dimana hal ini untuk mencegah adanya pelanggaran dalam Pemilu.

Motivasi	Merupakan gejala psikologis yang membentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar guna melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.	1. Faktor Internal Faktor internal ini adalah faktor ideologis, yaitu bagaimana masyarakat melihat para calonnya atau bagaimana masyarakat melihat pemilu itu sendiri. Hal ini biasanya dilator belakang oleh tinggi atau rendahnya pendidikan dan ekonomi.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teori persepsi masyarakat dan motivasi beserta dengan indikatornya ini nantinya dipakai oleh peneliti untuk menjelaskan bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggal di desa dalam pemilihan presiden 2019 di Kecamatan Banguntapan. Karena seperti yang kita tahu bahwa masyarakat yang tinggal di pedesaan masih belum terlalu peduli dan antusias dengan pemilihan umum, mulai dari pemilihan legislatif sampai pemilihan eksekutif. Dengan teori diatas dapat di temukan bagaimana persepsi masyarakat dan motivasi seperti apa di masyarakat terkait Pemilihan Presiden tahun 2019.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian tersebut maka desain penelitian dalam penelitian ini merupakan tipe deskriptif. Djarm'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian – pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar – gambar, gaya – gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Penelitian deskriptif juga dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan untuk melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada (Rakhmat, 1999:25) serta memberikan gambaran yang terperinci mengenai penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia yang terkandung dalam sebuah sajian film dan bagaimana kita dapat menyelaraskan hal tersebut dengan permasalahan etnis serta agama yang saat ini sedang berkembang.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana fenomena terkait partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan presiden tahun 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam metode kuantitatif.

1.7.2 Situs Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti maka penelitian ini menetapkan situs penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih

tepatnya di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk dapat dengan mudah memperoleh data. Karena objek penelitian tersebut berada di masyarakat desa Kabupaten.

1.7.3 Subjek Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti akan penelitian ini menetapkan subjek penelitian pada masyarakat desa penduduk Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul karena dianggap sebagai aktor utama dalam penelitian yang menyangkut partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan calon presiden 2019.

1.7.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa penjelasan deskriptif yang menggambarkan masalah partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan calon presiden 2019.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu

penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berusaha menjelaskan hubungan sebab akibat, prediksi, serta generalisasi hasil. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama (Golafshani, 2003). Penelitian kualitatif sangat efektif untuk mendapatkan informasi budaya yang spesifik seperti nilai-nilai, opini, perilaku dan konteks social pada suatu populasi (Kuntari, 2007).

Metode kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif Weberian, perspektif post-positivistik kelompok teori kritis serta post-modernisme seperti dikembangkan oleh Baudrillard, Lyotard, dan Derrida (Cresswell, 1994). Bentuk penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Memang dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Dengan demikian, hal yang umum dilakukan ia berkuat dengan analisa tematik. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya (Somantri, 2013).

1.7.5 Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua jenis data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer menurut Hasan (2002: 82) ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan. Informan yang di dapat yaitu selaku penyelenggara KPU Kabupaten Bantul Ibu Musnif Istiqomah, SPd.I. dan Bapak Rahmat Purwono. S.IP., MA, selaku panitia pengawas yaitu, Miftah Kusuma Aji dan Nining, dan masyarakat Kecamatan Banguntapan itu sendiri yaitu, Vina, Karsono, Satrio, Kastowo, Wahyu Setyaningrum, Wahyuni, Krisna Himawan, Parjono dan Waljinah.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara. Menurut Sugiyono (2010:194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan berjalannya selama wawancara dengan tetap berpedoman.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisa kualitatif bersifat induktif, artinya dari data yang diperoleh kemudian dikembangkan dan diuji apabila dapat diterima maka akan menjadi sebuah teori (Somantri, 2013).

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Huberman, 1992).

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan

validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu kesimpulan dalam penelitian kasus tersebut diharapkan dapat menjawab rumusan masalah partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan presiden 2019.